

Judul : Tes Kemampuan Akademik (TKA) Siswa Ditanggapi Pro Dan Kontra
Tanggal : Rabu, 05 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Sudah Berlangsung Sejak 3 November

Tes Kemampuan Akademik (TKA) Siswa Ditanggapi Pro Dan Kontra

Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa SMA sederajat sudah berlangsung sejak Senin, 3 November 2025. Namun, di laman *change.org* sedang ramai penolakan terkait pelaksanaan TKA ini.

Pantauan Rakyat Merdeka pada Selasa (4/11/2025) pukul 17.00, petisi berjudul "Batalan Pelaksanaan TKA" ini sudah mendapat 241.512 tanda tangan.

Dalam pemaparan masalah, pembuat petisi dengan nama akun Siswa Agit menjelaskan, sebagai siswa yang menjalani TKA, dia dan teman-temannya sangat merasa prihatin karena tekanan dalam belajar bertambah.

"Sebagai salah satu dari banyak siswa yang akan menghadapi TKA 2025, saya, bersama teman-teman seangkatan, merasakan keprihatinan yang mendalam," tulis Agit.

Menurut Agit, sistem baru ini tidak hanya menambah tekanan pada dirinya dan teman-temannya saja.

"Ini juga mempermainkan masa depan pendidikan kami," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengaku akan menyikapi serius adanya petisi terkait penolakan TKA tersebut. Menurut dia, petisi ini harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah.

"Hal ini untuk mempertimbangkan apakah kami perlu mendorong Pemerintah agar kebijakan ini direvisi atau diganti dengan sistem seleksi yang lebih adil dan transparan," ujar Lalu Hadrian Irfani kepada Rakyat Merdeka, Selasa (4/11/2025).

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai, petisi tersebut merupakan ekspresi dari siswa kelas XII SMA sederajat. Menurut

dia, petisi ini muncul juga karena pelaksanaan TKA dinilai tergesa-gesa.

"Mungkin di sekolahnya, tidak terlalu siap menghadapi TKA ini," ujar Satriwan kepada Rakyat Merdeka, Selasa (4/11/2025).

Untuk mengetahui pandangan Lalu Hadrian Irfani dan Satriwan Salim mengenai adanya petisi penolakan Tes Kemampuan Akademik bagi siswa SMA sederajat, berikut wawancaranya.

LALU HADRIAN IRFANI,
Wakil Ketua Komisi X DPR

Kami Akan Buka Ruang Dialog & Dengar Keluhan



“

Demokrasi hanya bermakna bila rakyat ikut serta, bukan diam dan menyerahkannya kepada segelintir suara yang aktif.

Bagaimana Anda melihat adanya petisi yang meminta tes kemampuan akademik (TKA) bagi siswa di hentikan?

Kami tentu menanggapi petisi penolakan TKA ini dengan serius. Komisi X DPR tentu membuka ruang dialog untuk mendengar keluhan publik tersebut, dan mengevaluasi substansi masalahnya.

Substansi yang Anda maksud seperti apa?

Ya seperti relevansi soal, beban biaya, serta dampak psikologisnya. Hal ini untuk memperjelas apakah kami perlu mendorong Pemerintah agar kebijakan ini direvisi atau diganti dengan sistem seleksi yang lebih adil dan transparan.

TKA sudah berlangsung, tapi apakah petisi ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah?

Meskipun TKA telah berlangsung,

petisi yang didukung lebih dari 240 ribu tanda tangan tersebut tetap harus menjadi perhatian serius Pemerintah. Sebab besarnya dukungan mencerminkan keresahan publik yang nyata, sehingga perlu direspons dengan evaluasi mendalam terhadap kebijakan ini untuk memperbaiki sistem seleksi yang lebih adil dan diterima masyarakat di masa mendatang.

Kalau Anda sendiri, bagaimana dengan sistem TKA ini?

Prinsipnya, kami mendukung pelaksanaan TKA sebagai instrumen untuk mengetahui capaian hasil belajar sekaligus memetakan mutu pendidikan. Dengan cara ini, bisa mendapatkan gambaran objektif mengenai kualitas pendidikan, apakah sudah merata atau masih terdapat ketimpangan. Namun demikian, saya memberikan sejumlah catatan penting agar kebijakan TKA tidak menimbulkan kebingungan.

Apa saja catatan Anda?

Jika hasil TKA dijadikan syarat wajib untuk mengikuti SNBP, maka seharusnya pelaksanaan TKA juga diwajibkan bagi seluruh siswa agar ada keadilan dan kepastian. Tetapi di sisi lain, kita juga perlu memastikan bahwa TKA tidak menjadi satu-satunya alat ukur capaian akademik. TKA seharusnya dilihat sebagai salah satu komponen penilaian yang melengkapi asesmen lainnya.

Catatan lainnya?

Kemendiknas perlu berkoordinasi dengan Forum Rektor maupun panitia nasional SNBP untuk menyamakan persepsi, dan memastikan sinkronisasi kebijakan antara pelaksanaan TKA dan seleksi masuk perguruan tinggi. Konsistensi kebijakan antar lembaga ini, menjadi kunci agar sistem seleksi nasional berjalan transparan, adil, dan terukur. ■ **NNM**

SATRIWAN SALIM, Koordinator Nasional
Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

TKA Untuk Mengetahui Kemampuan & Kompetensi



“

Tentu Kemendikdasmen harus menjadikannya bahan evaluasi dan masukan untuk mendesain TKA di tahun-tahun depan, agar lebih matang dan kuat.

Bagaimana Anda muncunya petisi penolakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang sudah mencapai 241 ribu tanda tangan di change.org?

Pertama, petisi yang muncul di change.org sudah sampai 241 ribu. Ini merupakan bentuk ekspresi dari para siswa kelas XII SMA ketika mereka merasa pelaksanaan TKA dinilai terlalu tergesa-gesa. Yang mereka rasakan, mungkin di sekolahnya guru maupun sekolah belum terlatih siap menghadapi tes kemampuan akademik. Sehingga pelaksanaan tes kemampuan akademik itu dinilai terlalu cepat.

Anda sendiri melihat TKA ini seperti apa?

Tes kemampuan akademik yang dapat mengukur kompetensi anak-anak secara individual. Sejak era Nadeem Makarim, Pemerintah atau negara tidak memiliki alat ukur yang terstandar untuk menilai kompetensi siswa per individu.

Jika hasil TKA dijadikan syarat

wajib untuk mengikuti SNBP, maka seharusnya pelaksanaan TKA juga diwajibkan bagi seluruh siswa agar ada keadilan dan kepastian.

Jadi, TKA ini sebenarnya bersifat wajib atau pilihan?

Sebenarnya TKA ini sifatnya pilihan, opsional. Secara regulasi melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (TKA), diatur bahwa TKA dilaksanakan sebagai alat validasi terhadap nilai rapor untuk masuk jalur perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP atau undangan. Kami pikir pelaksanaan TKA ini perlu sebagai alat validasi nilai rapor untuk masuk perguruan tinggi negeri jalur SNBP.

Kenapa seperti itu?

Karena setiap sekolah tidak memiliki standar yang sama untuk penilaian di rapor. Sehingga kecenderungan nilai

rapor siswa untuk jalur SNBP selama ini berada di posisi paling kanan atau homogen tinggi. Kalau kita lihat grafiknya, kurvanya cenderung ke sebelah kanan. Nilai rapor menjadi satu-satunya indikator penilaian dalam jalur undangan oleh perguruan tinggi negeri, selain indeks sekolah dan prestasi akademik maupun non-akademik selama kurang lebih tiga tahun.

Apa fungsi TKA terhadap kondisi tersebut?

Dengan adanya TKA, panitia SNBP atau panitia perguruan tinggi negeri untuk penerimaan mahasiswa baru bisa mendeteksi apakah kemampuan anak betul-betul menggambarkan nilai rapor yang tinggi itu. Apakah guru atau sekolah sudah berintegritas dan memberikan penilaian secara objektif atau belum. Maka nilai TKA memberikan validasi terhadap penilaian rapor dari semester 1 sampai semester 5. ■ **NNM**